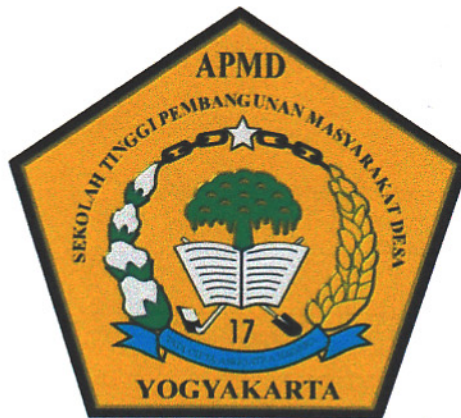


**KREATIVITAS PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DESA DI DESA UMBULHARJO KECAMATAN
CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN**

SKRIPSI



OLEH:

Yotam Majemus

NIM: 07521857

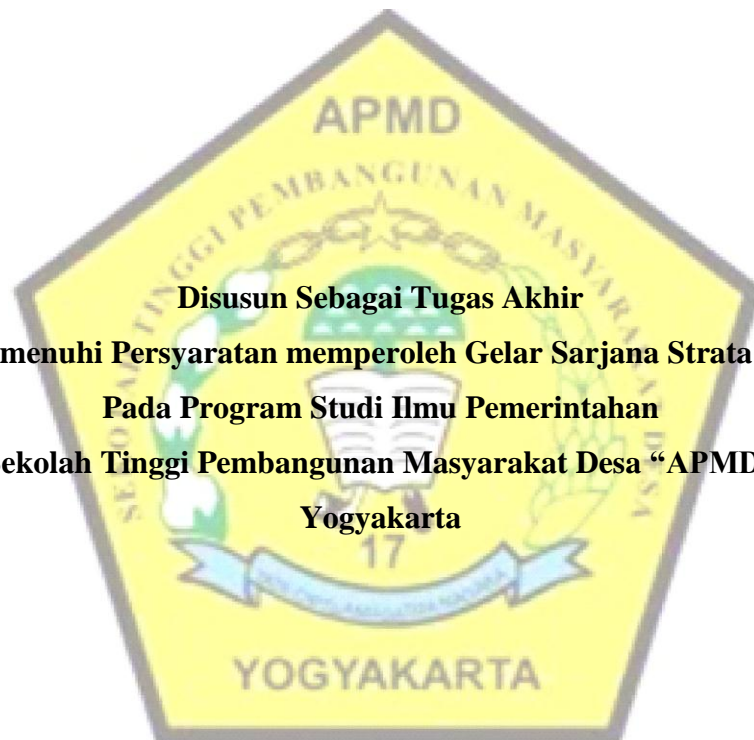


SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2016

**KREATIVITAS PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DESA DI DESA UMBULHARJO KECAMATAN
CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN**



**Disusun Sebagai Tugas Akhir
Untuk memenuhi Persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”
Yogyakarta**

OLEH:

**Yotam Majemus
NIM: 07521857**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2016**

HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan didepan Penguji Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 21 Oktober 2016
Waktu : 08.30 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

Tim Penguji	Nama	Tandatangan
1. Penguji Utama/Pembimbing	Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si	
2. Penguji Samping I	Gregorius Sahdan, S.IP, MA	
3. Penguji Samping II	Drs. YB. Widyo Hari Murdianto, M.Si	

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Gregorius Sahdan, S.IP, MA

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
"APMD" YOGYAKARTA**

2016

MOTTO

*Dia tidak akan membiarkan anda terjatuh
Dia yang mengawasi anda tidak akan terlelap
(Mazmur, 121 : 3)*

*Jangan pernah lupa bilang terimakasih,
Jangan pernah gengsi bilang maaf,
Jangan pernah terlalu sombong untuk bilang tolong*

Keberhasilan diawali dari Perjuangan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat waktu serta sesuai dengan yang diharapkan.

Penulis tertarik untuk meneliti Kreativitas Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pedapatan Asli Desa Di Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman. Penulisan skripsi ini selanjutnya untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana S1 pada Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD”APMD”. Selain itu, skripsi ini penulis persembahkan pada Pemerintah Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman sebagai sumbangan pemikiran untuk dijadikan referensi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan PADes.

Hanya karena kasih dan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan bimbingan dari Ibu Dosen Pembimbing, sehingga skripsi ini dapat selesai. Untuk itu perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Gregorius Sahdan, S.IP, MA selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” yang juga memberikan motivasi dan dorongan kepada saya sebagai Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan.
2. Ibu Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD”APMD”.

4. Seluruh keluarga besar tercinta Mojumos, yang senantiasa memberikan dorongan, do'a kepada saya sebagai penulis untuk melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Penulis menyadari tulisan ini jauh dari sempurna dan banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran senantiasa penulis harapkan. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam Studi Ilmu Pemerintahan.

Yogyakarta, Oktober 2016

Penulis

Yotam Majemus

SINOPSIS

Desa sebagai pemerintahan tingkat terendah yang dapat menyentuh langsung dengan masyarakat sehingga diharapkan lebih berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa agar dapat memberikan kontribusi bagi terlaksananya pembangunan secara nasional. Oleh karenanya optimalisasi pendapatan asli desa menjadi hal yang sangat penting. Berangkat dari fenomena sebagaimana tersebut diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kreativitas Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman.

Jenis penelitian bersifat deskriptif kualitatif yaitu: memberikan gambaran tentang masalah yang diteliti, menyangkut kebijakan pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan asli desa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisa kualitatif maka data yang dikumpulkan berupa studi kasus mudah diklarifikasi dan jumlahnya sedikit. Dalam analisa kualitatif maka data yang diperlukan dalam penelitian tidak dianalisis menggunakan angka-angka melainkan yang diperoleh akan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kreativitas pemerintah desa dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi desa maka perlu untuk meningkatkan dan mengembangkan segala potensi-potensi sumber daya ekonomi yang ada di Desa Umbulharjo. Kreativitas pemerintah desa dalam perencanaan PADes dilakukan dengan mencermati sumber-sumber PADes, dan selanjutnya berbagai sumber tersebut, dikoordinasikan dengan semua komponen yang ada di desa. Koordinasi aparatur desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa baik namun koordinasinya terjadi selalu berharap pada pencairan dana dari atasan dan kurang memaksimalkan potensi-potensi desa yang sekiranya dapat menambah pendapatan asli desa Umbulharjo. Kreativitas dalam rangka peningkatan PADes, dilakukan dengan melakukan pembagian kerja yang jelas, antar perangkat desa, sehingga hasil PADes dapat maksimal. Dalam melakukan pengawasan guna meningkatkan pendapatan asli desa, peran BPD sudah baik namun belum maksimal dalam memaknai tugas dan fungsi mereka masing-masing.

DAFTAR ISI

HALAMAN KULIT MUKA	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
SINOPSIS	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	i
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kerangka Teori	6
E. Ruang Lingkup Penelitian	19
F. Metode Penelitian	20
BAB II PROFIL DESA	24
A. Geografis	24
B. Demografi	24
C. Struktur Pemerintahan Desa	25
BAB III DESKRIPSI INFORMASI DAN ANALISIS DATA	34
A. Deskripsi Informasi	34
B. Analisis Data	36

BAB IV	PENUTUP	49
	A. Kesimpulan	49
	B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Phillip Ruop dalam Waluya (2007: 101) menyatakan bahwa secara sosiologis, desa merupakan: a) Daerah yang sama dilihat dari segi geografis dan administratif; b) Nilai sosial yang sama, artinya seluruh anggota masyarakat desa menganut nilai-nilai sosial yang sama; c) Kegiatan 11 yang sama terutama dalam sistem mata pencaharian. Masyarakat desa sangat bergantung pada pertanian, yang tentu saja tidak lepas dari pengaruh lingkungan alam; d) Corak kehidupan di desa didasarkan pada kekeluargaan yang erat. Sesuai dengan pendapat tersebut, pengertian desa dapat di lihat dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat 1, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU 6/2014: pdf).

Kemudian terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, dijelaskan pula dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat 2 dan 3. Ayat 2 menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI. Kemudian Ayat 3 menjelaskan bahwa pemerintah desa

adalah kepala desa yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kedudukan desa telah ditetapkan dan memiliki landasan hukum.

Mengikuti model distribusi kewenangan berdasarkan kedudukan desa, maka hubungan keuangan desa dengan pemerintah dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Desa kesatuan masyarakat, memperoleh bantuan pemerintah terutama untuk mendukung pengembangan masyarakat;
2. Desa sebagai unit pemerintahan lokal yang otonom, memperoleh dana alokasi desa secara nasional seperti halnya DAU yang diterima oleh propinsi dan kabupaten/kota yaitu Alokasi Dana Desa (ADD);
3. Desa administratif, memperoleh bantuan operasional, bantuan pembangunan dan bantuan dalam tugas pembantuan (www.kpu.go.id/Pemerintahan%20Daerah.pdf Diunduh 12/1/2016).

Berdasarkan tiga jenis kedudukan desa, berdasarkan hubungan keuangan antara pemerintah desa di atas, maka PADes masuk dalam jenis pertama. Dikatakan demikian karena ditinjau dari segi pemerolehannya, PADes merupakan pendapatan desa yang berasal dari potensi aam dan potensi masyarakat desa sendiri, yang peruntukannya lebih pada untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa.

Pendapatan Asli Desa (PADes) mencakup berbagai sektor, yaitu: hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong

royong, serta lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Jika PADes dapat ditingkatkan maka desa akan mendapatkan dana pengelolaan dan pembiayaan pembangunan, sehingga kemandirian desa dapat terwujud dalam memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas-fasilitas umum. Hal ini akan menjadikan desa untuk tidak hanya menunggu pembangunan dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat.

Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 6 tahun 2014, pasal 72 ayat 1 pendapatan desa sebagaimana dimaksud pasal 71 ayat (2) bersumber dari: a) Pendapatan Asli Desa yang mencakup hasil asset desa, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa. b) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. c) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota. d) Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. e) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. f) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. g) Lain-lain pendapatan desa yang sah. (UU/6/2014: pdf).

Berkaitan dengan lain-lain pendapatan asli desa, maka dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa. BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan

terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa dan merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka, serta memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal. Oleh karena itu optimalisasi pendapatan asli desa melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi hal yang sangat penting dalam mendukung penguatan PADes.

Selain dari BUMDes, PADes juga didukung oleh usaha swadaya masyarakat seperti UKM, kelompok pertanian yang dibangun atas inisiatif warga, retribusi desa, dana swadaya untuk pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana desa, dan lain sebagainya. Demikianlah, ada banyak titik yang sangat berkontribusi bagi PADes. Berbagai upaya dalam meningkatkan PADes tentu juga melibatkan masyarakat, inisiatif masyarakat, dan tidak harus mengandalkan pemerintah, apalagi terkait pembangunan ekonomi desa.

Pembangunan ekonomi pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi nasional. Keberhasilannya tentu juga disokong oleh kemampuan pemerintah desa dalam mengatur keuangannya. Mayoritas desa memang mengandalkan bidang pertanian dan peternakan dalam menopang perekonomiannya. Oleh karena itu tidak mengherankan, kegiatan usahatani sering dijadikan indikator pembangunan ekonomi pedesaan.

Dalam penelitian ini, Desa Umbulharjo di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman yang berada di kawasan Lereng Merapi menjadi lokasi penelitian. Pemilihan lokasi ini, didasarkan pada karakteristik perekonomian desa yang beragam, yang ditinjau dari berbagai sektor, yaitu: pertanian, peternakan dan perikanan, kerajinan tangan, dan pariwisata. Demikianlah Desa Umbulharjo dapat dikatakan memiliki banyak sektor dalam kontribusinya terhadap PADes. Desa Umbulharjo telah dicanangkan sebagai desa wisata sejak tahun 2008. Menurut Sumardi selaku kepala desa wisata Umbulharjo, menyatakan bahwa keunggulan desa wisata Umbulharjo karena memiliki 3 aspek yang sangat diandalkan. Antara lain keunikan alam, sistem kerja dan pemberdayaan masyarakatnya (<https://gudeg.net/direktori/1897/desa-wisata-Umbulharjo-yogyakarta.html>).

Desa wisata Umbulharjo yang dirilis pada awal tahun 2008 telah sesuai dengan kesepakatan warga masyarakat, dalam rangka menanggapi program pemerintah tahun 2006, yakni program Pariwisata Inti Rakyat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan potensi-potensi perekonomian yang ada di desa, sesuai dengan karakteristik dan keunikan desa, sehingga dapat memberikan kontribusi kepada masyarakatnya. Oleh karena itu penelitian ini hendak mengetahui sejauh mana peran pemerintah dalam menggerakkan perekonomian masyarakat di Desa Umbulharjo.

Berdasarkan deskripsi di atas, maka kreativitas pemerintah desa sangat penting dalam pengelolaan PADes. Pemerintah desa harus mampu mengalokasikan pendapatannya secara tepat guna. Di samping untuk

pembangunan masyarakat desa, juga harus mampu mendorong sektor-sektor yang potensial, sesuai dengan karakter wilayah. Terkait hal ini, program desa wisata merupakan salah satu sektor yang dapat mengembangkan perekonomian desa, dan penerapannya juga harus sesuai dengan karakteristik wilayah desa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi pada latar belakang di atas, maka penelitian ini akan mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana kreativitas pemerintah desa dalam pengelolaan PADes di Desa Umbulharjo?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kreativitas pemerintah desa dalam meningkatkan PADes di Desa Wisata Umbulharjo.

D. Kerangka Teori

1. Kreativitas

Kreativitas adalah kegiatan yang mendatangkan hasil yang sifatnya:

- 1) Baru (*novelty*); inovatif, belum ada sebelumnya, segar, menarik, aneh, mengejutkan.
- 2) Berguna (*useful*); lebih enak, lebih praktis, mempermudah, memperlancar, mendorong, mengembangkan, mendidik, memecahkan masalah, mengurangi hambatan, mengatasi kesulitan, mendatangkan hasil

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineke Cipta:Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 1992. *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Bratakusumah, Supriyadi. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Campbell, David. 1986. *Mengembangkan Kreativitas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Green, Andy. 2004. *Kreativitas dalam Public Relations*. Jakarta: Erlangga.
- Hadinoto, Soetanto. 2007. *Micro Credit Challenge: Cara Efektif Mengatasi Pengangguran dan Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Iwan Triyuwono dan Ahmad Erani Yustika (eds.), 2003, *Emansipasi Kebijakan Lokal: Ekonomi dan Bisnis Pascasentralisasi Pembangunan*, Bayumedia, Malang.
- J. Krishnamurti, 1978. *Teori Sosiologi tentang Struktur Masyarakat*. Yayasan Krishnamurti. Indonesia.
- Kaho, Josef Riwu, 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Yogyakarta: Fak. Sospol UGM.
- Muhammad, Fadel. 2008. *Reinventing Local Government: Pengalaman dari Daerah*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Moleong, J. Lexy. 2001. *Metode penelitian kualitatif*. CV Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi. 1989. *Metode Penelitian Survey* Yogyakarta.
- Nurcholis, Hanif. 2009. *Perencanaan Partisipasif Pemerintah Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Purwodarminto.1993 *Kamus besar Bahasa Indonesia*. Pustaka Utama, Jakarta.
- Saifuddin.2014. *Pengelolaan Pembelajaran teoritis dan Praktis*. Yogyakarta: Deepublish.
- T. Guritno, 1992. *Kamus Ekonomi*. Erlangga. Jakarta.

Waluya, Bagya. 2007. *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*. Bandung: PT Setia Purna Invest.

UU No 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*

<http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/ART4-2c.pdf>

<https://gudeg.net/direktori/1897/desa-wisata-pentingsari-yogyakarta.html>

<http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Manfaat%20Bijak%20Dana%20Desa.pdf>